RESUME MATA KULIAH

HUKUM TATA NEGARA

Nama : Mutmainnah

Nim : 10200120201

PEMBAHASAN

1. Pengertian hukum tata Negara

Hukum tata Negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga didalam suatu Negara,yaitu eksekutif,legislatif,yudikatif.

Adapun definisi hukum tata Negara menurut beberapa para ahli yaitu

a. Van der pot

Hukum tata Negara adalah peraturan peraturan yang menentukan badan badan yang diperlukan beserta kewenangannya masing masing hubungannya satu sama lain serta hubungannya dengan individu warga Negara dalam kegiatannya.

b. Paul schoulten

Hukum tata Negara adalah het recht dat regelt de staatsorgani satie,atau hukum yang mengatur mengenai tata organisasi Negara.

c. Christian van vollenhoven

Hukum tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya,dan dari masing masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya,badan badan yang berkuasa, fungsi,susunan dan wewenang masing masing dalam lingkungan masyarakat hukum tersebut.

d. J. H. A. Logeman

Hukum tata Negara adalah hukum yang mengatur mengenai organisasi Negara.

e. Menurut Apeldorn

Hukum tata Negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata Negara dalam arti sempit,adalah untuk membedakannya degan hukum Negara dalam arti luas,yang meliputi hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara itu sendiri.

f. Paton George whitecross

Hukum tata Negara adalah hukum yang mengatur alat alat perlemgkapan Negara,tugasnya,wewenang dan hubungan antara alat pelengkap Negara itu.dalam bukunya "textbook of jurisprudence." Yang merumuskan bahwa constitutional law deals with the ultimate question of distribution of legal ower and the fungctions of the state.

Hukum tata Negara merupakan peraturan yang mengatur organisasi dari pada Negara,hubungan antara alat perlengkapan Negara dalam garis vertical dan horizontal serta kedudukan warga Negara dan hak hak azasinya.

Kajian ilmu hukum tata Negara adalah Negara. Dimana Negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang kongkrit. Artinya objeknya terikat pada tempat,keadaan dan waktu tertentu. Hukum tata Negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan,stuktur kenegaraan,mekanisme hubungan antar struktur organ atau struktur Negara dan warga Negara.

2. Tujuan hukum tata Negara

Adapun tujuan hukum tata Negara bahwa hukum tata Negara mengkaji beberapa aspek krusial, yakni Negara/organ negara, hubungan antara organ/lembaga Negara, dan hubungan antar organ/lembaga Negara dengan warganya.

3. Ruang lingkup hukum tata Negara

Ruang lingkup kajian hukum tata Negara adalah mengenai organisasi Negara yang mencakup mengenai lembaga-lembaga Negara, hubungan satu dengan yang lain, dan kekuasaannya. Selain itu, juga mencakup mengenai warga Negara termasuk Hak Asasi Manusia (HAM), dan wilayah negara.

4. Sumber sumber hukum tata Negara

1. Undang undang dasar dan peraturan perundang undangan tertulis

Undang undang dasar dan peraturan perundang undangan yang tertulis

Undang undang dasar adalah hukum dasar yang berlaku di suatu Negara. Hukum ini tidak mengatur hal hal yang terperinci melainkan hanya menjabarkan prinsip prinsip yang menjadi dasar peraturan peraturan lainnya. Undang undang dasar merupakan naskah konstitusi yang tertulis dalam satu kodifikasi.

Peraturan perundang undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

2. Yurisprudensi peradilan

Istilah yurisprudensi, berasal bahasa latin, yaitu dari kata “jurisprudentie” yang berarti pengetahuan hukum. Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis peradilan sama artinya dengan kata “jurisprudentie” dalam bahasa belanda, yaitu peradilan tetap atau hukum peradilan.

Adapun menurut Subekti (1974 : 117)

Yurisprudensi adalah putusan hakim atau peradilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap.

3. Konvensi ketata negaraan

Konvensi konvensi ketatanegaraan yang berlaku dan dihormati dalam kehidupan ketatanegaraan, walaupun tak dapat dipaksakan oleh pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadapnya.

4. Hukum internasional tertentu

Hukum public internasional secara umum dianggap menjadi sumber hukum tata Negara. meskipun sama sama menjadikan Negara selaku subjek hukum sebagai obyek kajiannya, antara hukum tata Negara dengan hukum internasional public jelas dapat dibedakan satu sama lainnya. Hukum tata Negara dari segi internalnya, sedangkan hukum internasional melihat Negara dari hubungan eksternalnya dengan subyek subyek Negara lain.

5. Doktrin ilmu hukum tata Negara

Doktrin TOBAR yaitu mengenai kesepakatan 5 negara yang tidak mengakui pemerintahan hasil pemberontakan atau perebutan kekuasaan dan hanya akan mengakui apabila secara konstitusionalitas Negara terpenuhi. artinya meski pemerintah itu efektif memegang kekuasaan, pengakuan harus ditangguhkan sampai rakyat di Negara itu melalui suatu pemilu yang bebas telah menyatakan sikapnya terhadap pemerintah baru itu.

5. Asas-Asas Hukum Tata Negara

a. Asas pancasila

Bangsa Indonesia telah menetapkan falsafah/asas dasar Negara adalah pancasila yang artinya setiap tindakan/perbuatan baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran pancasila. dalam bidang hukum, pancasila merupakan sumber hukum materil, sehingga setiap isi peraturan perundang undangan tidak boleh bertentangan dengan sila sila yang terkandung dalam pancasila. undang undang dasar 1945 mengandung empat pokok pokok pikiran yang merupakan cita cita hukum bangsa Indonesia yang mendasari hukum dasar Negara baik hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis.

b. Asas Negara Hukum

Setelah UUD 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum dimana sebelumnya hanya tersirat dan di atur dalam penjelasan UUD 1945”. Atas ketentuan yang tegas diatas maka setiap sikap kebijakan dan tindakan perbuatan alat Negara berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikianlah semua pejabat/alat alat Negara tidak akan bertindak sewenang wenang dalam menjalankan kekuasaannya.

c. Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi

Kedaulatan artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada ditangan rakyat. Sehingga dalam pemerintahan melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. Pasal 1 ayat 2 undang undang dasar 1945 berbunyi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Rumusan ini secara tegas bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat yang diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu kedaulatan rakyat tersebut baik wewenang tugas dan fungsinya ditentukan oleh UUD 1945.

d. Asas Negara Kesatuan

Pada dasarnya Negara kesatuan dideklarasikan pada saat menyatakan/memproklamkan kemerdekaan oleh para pendiri Negara dengan menyatakan seluruh wilayah sebagai bagian dari satu Negara. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia sebagai suatu Negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Negara kesatuan adalah Negara kekuasaan tertinggi atas semua urusan Negara ada di tangan pemerintah pusat atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara ialah pemerintah pusat.

e. Asas pembagian kekuasaan dalam check and balance

Pengertian pembagian kekuasaan adalah berbeda dari pemisahan kekuasaan pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan Negara itu terpisah pisah dalam beberapa bagian seperti dikemukakan oleh John Locke yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan federatif, sedangkan Montesquieu mengemukakan bahwa setiap Negara terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu trias politica, eksekutif, legislatif, yudikatif. Dari ketiga kekuasaan itu masing masing terpisah satu sama lainnya baik mengenai orang nya maupun fungsinya.

6. Sejarah ketatanegaraan

Sejarah ketatanegaraan Indonesia, mengenal beberapa undang undang dasar

Yang pernah berlaku yaitu UUD 1945 yang berlaku antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, konstitusi republic Indonesia serikat, UUD sementara 1950, yang berlaku antara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, UUD 1945, yang berlaku lagi sejak dikeluarkan Dekrit presiden 5 Juli 1959. Dalam keempat periode sejarah konstitusi Indonesia dengan tiga macam undang-undang dasar maka UUD 1945 berlaku dalam dua kurun waktu. Kurun waktu pertama telah berlaku UUD 1945 diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kurun waktu berlaku sejak presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang dan melalui dekrit itu telah dinyatakan berlaku kembali UUD 1945.

1. Periode UUD 1945 (18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949)
Kemerdekaan Indonesia pada awal pemerintahan masa orde lama ini merupakan awal mula Indonesia menyatakan dirinya bebas dari penjajahan sesuai dengan isi teks proklamasi 17 Agustus 1945 dan disusul dengan pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut Ismail Sunny dalam bukunya pergeseran kekuasaan Eksekutif, menyebabkan bahwa kesahan UUD 1945 harus diperimbangkan dengan menuntut kepada berhasilnya revolusi Indonesia. Karena revolusi Indonesia berhasil dan yang bentuk keberhasilannya adalah UUD 1945 sebagai konstitusi yang sah Negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Periode UUD 1945 (2 Desember 1949 sampai 7 Agustus 1950)
Perjalanan Indonesia sebagai Negara yang baru telah terlepas dari penjajahan ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang ingin kembali menguasai Negara Indonesia. Maka Belanda menggunakan cara dengan membagi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Negara Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan dan sebagainya, tindakan ini mereka anggap cara yang paling mudah untuk meruntuhkan kesatuan Republik Indonesia dengan Yogyakarta sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia serikat terhitung dari tanggal 23 Agustus 1949 November 1949.

Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Negara Republik Indonesia, Dan dalam konferensi itu dihasilkan tiga persetujuan pokok, yaitu.

- a. Mendirikan Negara Republik Indonesia serikat
 - b. Penyerahan kedaulatan kepada Negara Republik Indonesia serikat terdiri dari, piagam penyerahan kedaulatan, status Uni, persetujuan perpindahan.
 - c. Didirikan Uni antara Republik Indonesia serikat dan kerajaan Belanda.
3. Periode UUD 1945 (17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959)
Sejarah lahirnya kembali UUD 1945 Negara Republik Indonesia serikat tidak bertahan lama dikarenakan perubahan UUD 1945 menjadi UUD R.I.S hanya bersifat sementara dikarenakan Indonesia sejak 17 Agustus 1945 mengkehendaki sifat Negara kesatuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan Negara yang tergabung dengan RIS satu persatu kembali kepada Negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga akhirnya tinggal 3 negara bagian yang masih tergabung dalam R.I.S. dari keadaan tersebut mengurangi wibawa RIS yang mencerminkan sistem pemerintahan yang federal. Akhirnya dicapailah kata sepakat antara Negara Republik Indonesia serikat yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera dan Republik Indonesia untuk kembali Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), persetujuan tersebut tertuang didalam suatu persetujuan 19 Mei 1950 dimana tercapai kata sepakat bahwa akan

kembali kepada Negara kesatuan Indonesia sebagaimana di proklamirkan pada Agustus 1945.

4. Periode UUD 1945 setelah Dekrit 5 juni 1959 sampai Masa Reformasi
Sesuai dengan dikeluarkannya dekrit 5 juli 1959 oleh presiden, menurut Hazairin, dalam bukunya Demokerasi panca sila, menganggap bahwa perujukan dekrit 5 jui 1959 pada piagam Jakarta itu sangat penting bagi penjelasan pasal 29 ayat 1 UUD 1945. pada pasal 29 ini terjadi lagi perdebatan antara kaum nasionalis agama dengan kaum nasionalis yang lain atas dasar pernyataan bahwa dengan dikeluarkannya dekrit 5 juli 1959 yang intinya presiden ingin kembali kepada UUD 1945 sebagai dasar dan konstitusi Negara Republik Indonesia.

7. **Konstitusi sebagai objek kajian Hukum Tatanegara**

Istilah konstitusi berasal dari bahasa perancis (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara. sehingga konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara, dengan demikian suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai sendi sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yaitu Negara. bertolak dari konsepsi tersebut, maka secara umum istilah konstitusi menggambarkan keseluruhan system ketatanegaraan suatu Negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah Negara. Peraturan peraturan tersebut ada yang tertulis dan yang tidak tertulis.

Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi 3 yaitu

1. Die politische verfassung als gesellschaftlich. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai kenyataan. jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
2. Die selbststandige rechtverfassung. konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. jadi mengandung pengertian yuridis.
3. Die geschriebene verfassung. konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu Negara.

Dari pendapat Herman Heller tersebut dapatlah kita simpulkan bahwa jika Undang undang dasar dihubungkan dengan konstitusi, maka undang undang itu baru merupakan sebagian dari pengertian konstitusi yang tertulis saja. Disamping itu konstitusi itu tidak hanya bersifat yuridis semata, tetapi mengandung pengertian sosiologis dan politis.

Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian

1. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan ketentuan dasar atau hukum dasar (droit constitutionnelle), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis ataupun campuran keduanya.
2. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau undang undang dasar (loi constitutionnelle), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan peraturan dasar Negara. misalnya UUD RI 1945, konstitusi USA 1787. Adapun pembagian dan klasifikasi konstitusi menurut Carl Schmitt dan K.C. Wheare dalam bukunya "verfassungslehre" yaitu
 - a. Konstitusi absolut (absolut begriff der verfassung)
 - b. Konstitusi relatif (relative begriff der verfassung)
 - c. Konstitusi positif (positive begriff der verfassung)

d. Konstitusi ideal (ideal begriff der verfassung)

8. Organ dan fungsi kekuasaan Negara

Dalam diskursus mengenai organisasi Negara, terdapat dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ adalah bentuk atau wadahnya bukan General Theory of law and state, bahwa konsep organ “whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ” (siapa pun yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum adalah suatu organ). Sedangkan fungsi berkaitan dengan maksud pembentukannya.

- Fungsi fungsi kekuasaan
Negara hukum yang dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut rechtsstaat memiliki ciri-ciri, yang salah satunya menekankan adanya pembagian kekuasaan, sebagaimana yang dipelopori oleh **Friedrich Julius Stahl**, yaitu
 1. Perlindungan kekuasaan
 2. Perlindungan hak asasi manusia
 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan
 4. Peradilan administrasi.

Selain merujuk pada ciri-ciri Negara hukum yang ditemukan oleh Stahl, pembatasan/pemisahan mengenai fungsi-fungsi kekuasaan yang paling populer adalah dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Charles de Secondat baron de La Brède et de Montesquieu, dengan teori Trias Politikanya. Meskipun teori-teori mengenai fungsi-fungsi kekuasaan tidak hanya berasal dari Montesquieu, karena terkait dengan hal tersebut juga terdapat teori yang dikemukakan oleh **John Locke** dan **Van Vollenhoven**. Tetapi dari ketiganya, pemikiran Montesquieu yang paling berpengaruh.

Perbedaan antara teori dari **Montesquieu** dengan **John Locke** terletak pada fungsi federal, menurut **Montesquieu** fungsi yudisial jauh lebih penting karena keberadaannya untuk menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia, sedangkan fungsi federatif dapat dijalankan oleh fungsi eksekutif, sehingga tidak musti dipisahkan secara tersendiri. Sementara **John Locke** lebih mementingkan hubungan dengan Negara-Negara lain, melalui fungsi federatifnya, dan menurutnya fungsi yudisial dapat dijalankan melalui fungsi legislatif.

Adapun fungsi legislatif atau pengaturan adalah salah satu fungsi utama dari cabang kekuasaan legislatif, yang berwenang merumuskan/membentuk peraturan yang bersifat mengikat dan membatasi. Terdapat empat bentuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsi legislasi yaitu prakasa pembuat undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang dan pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya. Sedangkan kekuasaan **eksekutif**, cabang kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan, yaitu sistem presidential, sistem parlementer dan sistem campuran. Sedangkan yudikatif adalah kekuasaan peradilan yang dalam kekuasaannya menjaga undang-undang, peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang harus ditaati dengan menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum. Selain itu, lembaga yudikatif juga bertugas memberikan keputusan dengan adil dalam sengketa sipil yang diajukan ke pengadilan untuk diputuskan.